

Peran Media Sosial dalam Gerakan Menolak Rencana Penundaan Pemilu di Indonesia

Bayu Satria Utomo

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia - Depok

Email: bayu.satria81@ui.ac.id

Irwansyah

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia - Depok

Email: irwansyah.ma@ui.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengelaborasi peran media sosial sebagai saluran dalam gerakan menolak rencana penundaan Pemilu 2024 di Indonesia. Manuel Castells menyatakan bahwa media sosial telah menjadi platform yang signifikan bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka dan membentuk opini terkait proses demokrasi. Artikel ini menganalisis peran penting yang dimainkan oleh media sosial dalam gerakan menolak rencana penundaan pemilu 2024 di Indonesia. Fokus utamanya adalah untuk menganalisis sebuah fenomena berdasarkan kerangka teori *Connective Action* yang digunakan. Secara singkat, *Connective Action* melihat partisipasi dalam gerakan berdasarkan konektivitas media sosial. Data dari Drone Emprit Academy (DEA) terkait isu penundaan pemilu di Indonesia menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Selain itu, data juga didapatkan dari hasil wawancara dengan sejumlah aktor gerakan dan observasi partisipatif penulis. Analisis yang dilakukan meliputi pemanfaatan media sosial terutama Twitter untuk mengorganisasi dan memobilisasi massa, menyebarkan informasi, memengaruhi opini publik, serta berinteraksi dengan aktor-aktor politik. Data dianalisis dengan mempertimbangkan kontribusi media sosial terhadap dinamika gerakan sosial dan keterkaitannya dengan teori *Connective Action* untuk menganalisis tipologi gerakan di media sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media sosial telah berhasil meningkatkan konektivitas gerakan menolak penundaan pemilu di Indonesia karena konektivitas yang dibangun oleh para penggunanya.

Kata Kunci: Gerakan, Media Sosial, Penundaan, Pemilu

Abstract

*This article elaborates on the role of social media as a channel in the movement to reject plans to postpone the 2024 elections in Indonesia. Manuel Castells that social media has become a significant platform for people to voice their views and form opinions regarding the democratic process. This article analyses the important role played by social media in the movement to reject plans to postpone the 2024 elections in Indonesia. The main focus is to analyse a phenomenon based on the *Connective Action* theoretical framework used. In short, *Connective Action* seeks to see participation in movements based on social media connectivity. Data from the Drone Emprit Academy (DEA) regarding the issue of postponing elections in*

Indonesia is the main data source in this research. Apart from that, data was also obtained from interviews with several movement actors and the author's participatory observation. The analysis carried out includes the use of social media, especially Twitter, to organize and mobilize the masses, disseminate information, influence public opinion, and interact with political actors. Data were analysed by considering the contribution of social media to the dynamics of social movements and its relationship to Connective Action theory to analyze the typology of movements on social media. The conclusion of this research is that social media has succeeded in making the movement against postponing elections in Indonesia a success because of the connectivity built by its users.

Keywords: Election, Movement, Postponement, Social Media

PENDAHULUAN

Pemilihan umum dalam sistem demokrasi merupakan mekanisme pemilihan pejabat publik yang didasari komitmen menjamin kebebasan warga negara untuk berpartisipasi secara luas (Blais et al. 2017, Hammar 2017, Rosanvallon 2018, Sozen 2019). Di Indonesia, kepentingan untuk menunjukkan bahwa negara menjalankan sistem demokrasi telah menjadikan pemerintah secara legal berkewajiban menyelenggarakan pemilihan umum dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang (Diprose et al. 2019, Aspinall et al. 2020, Mietzner 2020).

Secara legal pemerintah harus mempersiapkan pemilu lagi di tahun 2024. Akan tetapi, sejak tahun 2022 berbagai pimpinan lembaga pemerintahan di bawah kabinet Presiden Jokowi justru mewacanakan kepada publik tentang perlunya menunda pemilu 2024. Diawali pada tanggal 10 Januari 2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan rencana penundaan Pemilu 2024 di Indonesia. Bahlil menyatakan bahwa para pelaku usaha berharap agar pemilu ditunda demi menjaga stabilitas ekonomi. Usul tersebut kemudian mendapatkan tanggapan positif dari Ketua Umum Partai Politik seperti PKB, PAN, dan Golkar. Mereka menyatakan bahwa jika penundaan pemilu didasarkan pada aspirasi rakyat, mereka akan mendukungnya. Selain itu, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, semakin meningkatkan wacana pro penundaan Pemilu 2024. Pada 11 Maret 2022 Luhut mengklaim memiliki data besar atau *big data* yang menunjukkan bahwa ada 110 juta warga yang mendukung penundaan pemilu demi menjaga situasi sosial, politik, dan ekonomi (Detikcom, 2022). Data besar atau *big data* merujuk pada jumlah data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diproses menggunakan metode tradisional (Laney, 2001).

Menteri Koordinator Perekonomian, sekaligus Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, juga mengaku menerima aspirasi petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait penambahan masa jabatan presiden yang artinya pemilu 2024 harus ditunda. Nyaris senada, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengungkapkan beberapa alasan yang mendukung penundaan pemilu bervariasi, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak (Tempo.co, 2022). Setelah menyampaikan dukungan terhadap penundaan pemilu ini, Zulhas kemudian diangkat menjadi Menteri Perdagangan pada 15 Juni 2022 (Kompas.com, 2022). Awal mula dari rencana penundaan pemilu ini penulis kategorisasikan sebagai **babak pertama** dari gelombang menolak rencana penundaan Pemilu 2024.

Pewacanaan rencana penundaan pemilu dari para tokoh-tokoh pimpinan di kabinet pemerintahan Joko Widodo tersebut ternyata direspon oleh munculnya gerakan menolak rencana penundaan pemilu. Awal mula dari gerakan ini adalah petisi online dari Koalisi Tolak Penundaan Pemilu 2024 – koalisi berisikan 12 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga penelitian (Tempo.co, 2022). Koalisi tersebut membuat petisi pada laman Change.org ditandatangani lebih dari 32 ribu orang pada 16 Maret 2022 (CNN Indonesia, 2022). Setelah itu gerakan menolak penundaan pemilu terus bergulir hingga terjadi aksi mahasiswa yang besar pada 11 April 2022 (Detikcom, 2022). Aksi tersebut awalnya akan dilangsungkan di depan Istana Negara tetapi pada akhirnya bergeser ke depan Gedung DPR RI dengan diikuti sekitar 1.000 massa aksi (CNN Indonesia, 2022). Kedatangan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) ke Kampus UI pada 12 April 2022 disambut dengan aksi Mahasiswa UI yang menolak rencana penundaan Pemilu 2024 (Kumparan.com, 2022). Penulis juga menjadi bagian dari gerakan menolak penundaan pemilu tersebut pada tahun 2022. Usai beragam penolakan yang digaungkan oleh masyarakat dan mahasiswa, Luhut tetap menyampaikan bahwa penundaan pemilu sah-sah saja jika diproses oleh DPR dan MPR (Liputan6.com, 2022).

Bagi kalangan yang kontra, gagasan yang diajukan oleh para menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo dan tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah tersebut dianggap mengkhianati semangat reformasi tahun 1998 yang tujuan utamanya adalah membatasi masa jabatan presiden. Perubahan konstitusi di Indonesia pasca 1998 membuat perubahan sistem administrasi negara di Indonesia dimana ditetapkan pembatasan masa jabatan presiden (Najicha & Hermawan 2019).

Gerakan menolak rencana penundaan pemilu terus berlanjut di tahun 2023. Gelombang penolakan tersebut menguat lagi setelah 3 Maret 2023 saat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengeluarkan keputusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Setelah keputusan ini, berbagai tanggapan bermunculan di media sosial, terutama di Twitter. Putusan PN Jakpus tersebut merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh Partai Prima kepada KPU pada 8 Desember 2022. Gerakan di media sosial pasca putusan PN Jakpus, 3 Maret 2023 ini penulis kategorisasikan sebagai **babak kedua** dalam gerakan menolak rencana penundaan pemilu di Indonesia. Peran media sosial dalam gerakan inilah yang akan penulis elaborasikan dalam penelitian ini. Sedangkan seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa di tahun 2022 babak pertama dimulai dari terbitnya petisi online dan dilanjutkan dengan gerakan mahasiswa di jalan. Setelah itu, babak kedua muncul di tahun 2023 setelah putusan PN Jakpus tersebut dikeluarkan dan muncul penolakan yang masif di media sosial. Pada babak kedua ini, gerakan dibangun melalui sosial media oleh para tokoh politik hingga didukung oleh publik.

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sebagian besar kaum muda. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dan sumber informasi, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk menggerakkan masyarakat dalam melakukan protes terhadap pemerintah. Media sosial hadir dalam berbagai bentuk, terutama dalam bentuk teks, yang digunakan untuk menyampaikan dan mengungkapkan pendapat (Elshahed, 2020). Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan berbagai gerakan sosial baru yang muncul melalui media sosial. Melalui perangkat seluler, media sosial memungkinkan pengguna untuk menghubungkan ide, individu, organisasi, negara, dan gerakan sosial baru. Meningkatnya penetrasi internet telah menggandakan aktivitas gerakan sosial dalam dunia maya (Seebaluck, 2014).

Platform media sosial Twitter menjadi platform yang sangat aktif digunakan gerakan menolak rencana penundaan pemilu. Menurut data dari Drone Emprit, pada tanggal 3 Maret 2023 di Twitter ada 19.274 kali postingan dengan penyebutan terkait penundaan pemilu, yang dipicu oleh respon pengguna Twitter terhadap putusan PN Jakpus mengenai penundaan Pemilu. Selain itu, di media online pada tanggal yang sama terdapat 3.827 penyebutan kata, penolakan terhadap penundaan pemilu.

Adanya gerakan menolak rencana penundaan pemilu menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai gerakan yang muncul di media sosial. Utamanya, percakapan yang dominan menunjukkan sikap kontra dengan angka 91%, seperti tuduhan bahwa "Jokowi diduga menjadi dalang penundaan pemilu". Tidak hanya itu, netizen juga mengekspresikan pandangan bahwa pemilu seharusnya tetap berjalan sesuai rencana semula, dan mereka berpendapat bahwa penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, ada ajakan untuk melawan penundaan pemilu. Di sisi lain, percakapan yang bersifat pro hanya mencapai 6%, dan umumnya mencakup dukungan terhadap keputusan PN Jakpus mengenai penundaan Pemilu, serta penjelasan yang diberikan oleh Partai Prima mengenai hak menjadi peserta pemilu.

Banyak tokoh utama, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mahfud MD, Hidayat Nur Wahid, berbicara tegas dalam menentang penundaan pemilu di Twitter. Mereka mendukung pelaksanaan pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penolakan terhadap penundaan pemilu didasari oleh alasan-alasan seperti pelanggaran terhadap konstitusi, ketidaksetujuan terhadap upaya perpanjangan masa jabatan, dan keyakinan bahwa pemilu harus berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Di media online, sebagian besar pemberitaan mengambil narasi kontra terhadap penundaan pemilu, mengutip pernyataan sejumlah individu dan partai politik yang mempertanyakan keputusan PN Jakarta Pusat dan mengkritisi penundaan tersebut. Media sosial juga menjadi tempat dominan untuk menyuarakan penolakan. Lebih dari 90% percakapan di media sosial mencerminkan penolakan terhadap penundaan pemilu. Pengguna media sosial mengekspresikan ketidakpercayaan mereka terhadap keputusan PN Jakarta Pusat dan mengajak masyarakat untuk bersatu melawan penundaan tersebut.

Tagar seperti #RakyatOgahTundaPemilu dan #TolakTundaPemilu aktif digunakan untuk menyampaikan penolakan terhadap penundaan pemilu. Video yang paling banyak dibagikan adalah yang menjelaskan mengapa penundaan pemilu harus ditolak. Selain penolakan terhadap penundaan pemilu, juga terdapat kritik terhadap kredibilitas hakim yang memutuskan penundaan. Warganet mempertanyakan kompetensi hakim dan beberapa putusan hukum yang mereka anggap kontroversial. Dari latar belakang yang telah diuraikan maka fokus pertanyaan penelitian ini adalah **"Bagaimana Peran Media Sosial dalam Mensukseskan Gerakan Menolak Rencana Penundaan Pemilu 2024 di Indonesia?"**

TINJAUAN PUSTAKA

Media sosial, menurut Varinder Taprial dan Priya Kanwar (2012), adalah platform yang memungkinkan individu untuk bersosialisasi dan berbagi berbagai jenis konten dengan orang lain, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Menurut McGraw Hill (2006), media sosial adalah sarana interaksi di mana individu menciptakan, berbagi, dan bertukar informasi dan gagasan melalui jaringan siber atau komunitas maya.

Platform media sosial telah banyak digunakan sebagai alat komunikasi dan organisasi dalam berbagai protes di seluruh dunia selama lebih dari satu dekade. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengamati peran media sosial dalam memobilisasi gerakan sosial. Sebagai contoh, penelitian oleh Galuh (2016) membahas bagaimana karakteristik media sosial memengaruhi gerakan penolakan reklamasi di Bali. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kapriani dan Djuara (2015) yang menunjukkan bahwa media sosial efektif dalam memobilisasi gerakan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh akun @KesMat, baik secara daring maupun luring. Selain itu, penelitian oleh Sitowin dan Alfirdaus (2019) mencoba melihat bagaimana advokasi melalui media sosial dapat memperkuat gerakan menolak pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang dengan menggunakan metode studi kasus.

Peran media sosial ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di luar Indonesia. Sebagai contoh, penelitian oleh Lee S. (2018) mengkaji bagaimana media sosial memobilisasi masyarakat Korea untuk berpartisipasi dalam protes. Penelitian oleh Valenzuela (2013) juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan aktivitas politik dengan memeriksa tiga aspek terkait perilaku protes warga, yaitu informasi, ekspresi opini, dan aktivisme. Tusa (2013) telah mengeksplorasi pengaruh media sosial dan komunikasi berbasis internet pada gerakan sosial dalam dua studi kasus: protes di Mesir selama Musim Arab Spring dan pasca pemilihan protes di Iran pada 2009 yang kemudian dikenal sebagai awal dari Green Movement. Semua penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam memobilisasi gerakan protes, baik melalui internet maupun protes langsung.

Dalam penelitian ini, digunakan kajian yang diadakan oleh Lim (2013) yang berjudul "Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia," dan konsep Social Media Opinion Leader yang telah dikembangkan oleh para peneliti seperti Luarn et al. (2014), Park (2013), Zhang et al. (2016), dan Xu et al. (2014). Lim (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa gerakan di media sosial dapat mencapai kesuksesan dalam memobilisasi dukungan masyarakat jika tiga faktor kunci dipenuhi: pertama, adanya narasi

yang sederhana; kedua, simbol yang merepresentasikan isu dengan jelas; dan ketiga, aktivisme yang memiliki risiko rendah (*low-risk activism*). Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, banyaknya informasi yang tersedia, dan komunikasi singkat, yang menyebabkan individu lebih cenderung mengikuti isu berdasarkan preferensi mereka.

Menurut Jungherr (2015), isu-isu yang muncul di media sosial, terutama di platform seperti Twitter, tidak muncul secara spontan; sebaliknya, ada aktor atau kelompok yang menginisiasi percakapan di media sosial untuk menarik perhatian pengguna lainnya. Di media sosial, perhatian menjadi aset yang paling berharga. Pengguna yang berhasil memperoleh perhatian juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi pengguna lain untuk mengambil tindakan atau memperluas penyebaran isu tertentu (Xu et al., 2014). Seseorang yang memiliki pengaruh besar di media sosial dikenal sebagai *opinion leader* (Park, 2013; Zhang et al., 2016). Twitter adalah platform yang memungkinkan lebih banyak interaksi yang dapat diaktifkan dengan efisien (Stieglitz & Dang-Xuan 2013). Twitter adalah ruang obrolan yang memungkinkan pengguna terhubung satu sama lain dengan menggunakan tanda AT dan tujuannya adalah menciptakan jaringan sosial global di mana orang dapat mengirim dan menerima pesan instan secara *real-time* (Bertot et al. 2012).

Kerangka Teori

Peran media sosial dalam kerangka teori *connective action* ditekankan sebagai alat utama untuk menghubungkan individu yang memiliki kepentingan serupa, memfasilitasi keterlibatan mereka dalam tindakan kolektif. Penelitian yang dilakukan mencerminkan bagaimana media sosial berperan sebagai platform yang memungkinkan pertukaran informasi, pengorganisasian, dan mobilisasi dukungan untuk berbagai gerakan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep *connective action*.

Dalam konteks *connective action*, pentingnya tokoh-tokoh pendapat (*opinion leaders*) diakui sebagai elemen kunci dalam mempengaruhi individu lain untuk berpartisipasi dalam aksi bersama. Dalam penelitian ini, dipahami bahwa pengguna media sosial yang memperoleh perhatian atau memiliki pengaruh signifikan di platform tersebut dianggap sebagai *opinion leaders*. Teori *connective action* memberikan pemahaman mendalam tentang peran sentral yang dimainkan oleh individu-individu ini dalam menghubungkan orang lain dan memotivasi mereka untuk ikut serta dalam gerakan sosial.

Selain itu, *connective action* menekankan pentingnya kecepatan dan efisiensi dalam penyebaran informasi melalui media sosial. Temuan penelitian yang menunjukkan Twitter sebagai platform yang memungkinkan interaksi yang efisien dan komunikasi *real-time* mencerminkan konsep bahwa media sosial memfasilitasi penyebaran informasi yang cepat dan efisien, yang merupakan elemen kunci dalam pengorganisasian gerakan sosial.

Connective Action

Dalam menjawab fokus penelitian ini, teori yang digunakan untuk menjelaskan peran sosial media adalah "Connective Action," yang diperkenalkan oleh Bennett & Segerberg dalam buku mereka yang berjudul "The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics". *Connective Action* adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa gerakan sosial dalam era saat ini mungkin tidak memiliki pemimpin yang jelas, tidak mengikuti struktur organisasi yang kaku, dan memungkinkan individu untuk dengan mudah ikut serta atau keluar dari sebuah aksi. Fenomena ini terjadi karena peran sentral media sosial dalam menciptakan ruang publik baru untuk berpartisipasi dalam aksi dengan pola yang sebelumnya sulit dibayangkan. Jika dalam "collective action," sebuah aksi membutuhkan adanya ikatan keorganisasian, struktur organisasi, dan pemimpin yang memimpin aksi tersebut, "Connective Action" justru lebih menitikberatkan pada tindakan individu sebagai elemen kunci daripada tindakan kolektif. Teknologi berperan sebagai agen penyelenggara dalam "Connective Action," berbeda dengan "collective action" di mana teknologi digunakan sebagai alat atau instrumen.

Konsep "Connective Action" memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, individu dapat berpartisipasi tanpa perlu memiliki komitmen kepada kelompok tertentu. Partisipasi didasarkan pada kesamaan pandangan tentang suatu isu yang menjadi faktor pendorong individu untuk terlibat dalam *Connective Action*. Kedua, partisipasi dalam ranah digital lebih menekankan pada ekspresi personal daripada ekspresi dari sebuah kelompok. Penggunaan kata kunci (keyword) menjadi cara untuk menyuarakan isu-isu tertentu yang dapat menjadi bingkai dalam gerakan. Ketiga, jejaring komunikasi menjadi metode utama dalam mengorganisasi gerakan di media sosial, menggantikan hierarki dan keanggotaan dalam organisasi tradisional. Jejaring komunikasi ini bertindak sebagai pengoordinasi gerakan, memungkinkan individu-individu yang mungkin tidak saling mengenal atau bertemu secara langsung untuk terlibat dalam aksi tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bennett & Segerberg (2012), mereka mengidentifikasi tiga tipe jejaring aksi (*action network*). Salah satunya adalah "self-organizing network," yang mencirikan logika "Connective Action". Dua tipe lainnya menggambarkan variasi dalam jejaring yang dicirikan oleh logika "collective action". Tipe pertama adalah "self-organizing network," di mana gerakan menggunakan "Connective Action" tanpa struktur organisasi hierarkis yang memimpin aksi. Partisipasi didasarkan pada kerangka tindakan pribadi yang menekankan inklusivitas dan berbagi opini, pengalaman, dan keprihatinan pribadi di media sosial. Dalam tipe ini, individu dianggap sebagai unit yang saling terhubung satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln (2017), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak berfokus pada aspek kuantitas atau jumlah, tetapi lebih menekankan pada pemahaman tentang realitas yang dibangun secara sosial. Leavy (2017) juga menambahkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali, menggambarkan, atau menjelaskan fenomena sosial yang khusus. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah untuk menganalisis sebuah fenomena berdasarkan kerangka teori *Connective Action* yang digunakan.

Teori akan berperan sebagai kerangka dan panduan untuk menganalisis data lapangan. Pada kasus ini, teori *Connective Action* akan membantu mendalami peran media sosial dalam gerakan menolak penundaan pemilu. Dalam penelitian ini, data dari Drone Emprit Academy (DEA) terkait isu penundaan pemilu di Indonesia akan menjadi sumber data utama. Penggunaan data ini digunakan untuk melibatkan langkah awal dalam mengklasifikasikan data menjadi berbagai kategori, seperti Aktor, *Mention*, Tagar, Topik Pembicaraan, dan Jaringan Penyebaran melalui website <https://pers.droneemprit.id/>. Selain itu, data juga didapatkan dari hasil wawancara dengan sejumlah aktor gerakan dan observasi partisipatif. Data tersebut selanjutnya dianalisis keterkaitannya dengan teori *Connective Action* untuk membuktikan keberlakuan teori tersebut.

PEMBAHASAN

Peran media sosial dalam gerakan menolak penundaan pemilu khususnya Twitter telah menjadi pusat perhatian sebagai alat kunci dalam menyebarkan informasi, menghubungkan orang lain dan memotivasi mereka untuk ikut serta dalam gerakan sosial dan mobilisasi dukungan. Teori *connective action* menjelaskan fenomena ini sebagai sebuah evolusi dari *collective action*. Ditekankan bahwa teknologi digital terutama media sosial memungkinkan koordinasi yang lebih organik dan distribusi pesan yang lebih masif dibandingkan dengan metode tradisional organisasi gerakan sosial.

Twitter, sebagai platform media sosial sangat bergantung pada kecepatan dan kemudahan berbagi informasi, memfasilitasi penyebaran pesan yang emosional dan motivasional, yang mana ini merupakan unsur penting dalam mobilisasi massa. Menurut Jost et al. (2018), pesan yang menekankan kemarahan dan identifikasi sosial, serta pesan yang menonjolkan efikasi kelompok dan kekhawatiran terhadap isu-isu seperti keadilan dan ketidakadilan, seringkali menjadi pemicu partisipasi dalam aktivitas protes. Twitter memungkinkan pesan-pesan ini tersebar secara cepat dan luas, memungkinkan individu yang mungkin tidak memiliki koneksi langsung dengan satu sama lain untuk berpartisipasi dalam suatu gerakan bersama.

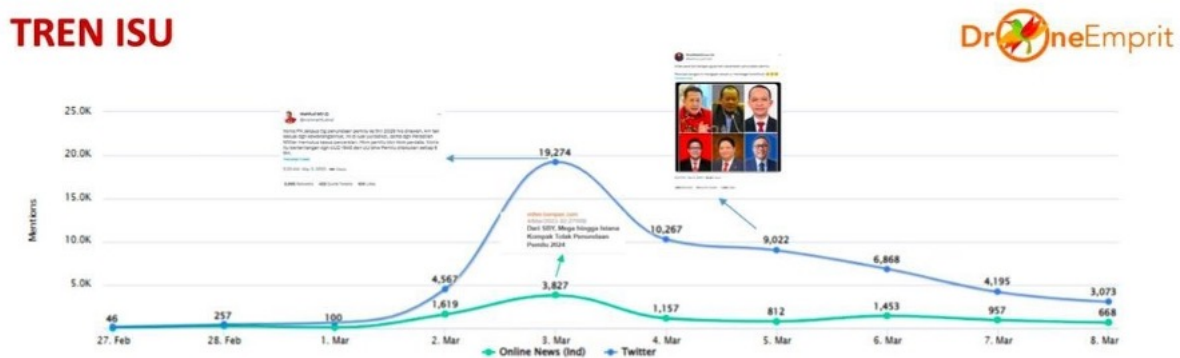
Dalam kasus gerakan menolak penundaan pemilu di Indonesia, warganet menggunakan Twitter tidak hanya sebagai sarana untuk mengekspresikan kekecewaan atau ketidaksetujuan mereka, tetapi juga sebagai cara untuk mengorganisasi dan memobilisasi massa. Tagar dan kata kunci menjadi alat penting dalam proses ini; mereka bertindak sebagai penanda yang memungkinkan orang untuk menemukan dan bergabung dalam percakapan yang relevan. Contohnya, kata kunci seperti "penundaan", "perpanjangan", "tunda", "menunda", "ditunda", "jakpus", "jakarta pusat" menjadi indikator topik yang sedang tren dan membantu dalam menyatukan orang-orang dengan pandangan yang sama untuk membentuk sebuah massa kritis yang dapat menarik perhatian lebih lanjut dari media dan pembuat kebijakan. Selain itu, juga terdapat tagar seperti #RakyatOgahTundaPemilu dan #TolakTundaPemilu juga menjadi topik dominan di sosial media.

Data dari pers.droneemprit.id menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kata kunci dan tagar di platform Twitter dapat menghasilkan gambaran yang sangat rinci tentang bagaimana sebuah isu dibicarakan dan dirasakan oleh publik. Dari analisis tren ini, kita bisa melihat bahwa penggunaan kata kunci dan tagar tertentu dapat mengindikasikan tingkat

keterlibatan dan perasaan yang dialami oleh netizen terkait dengan isu tersebut. Ketika topik seperti penundaan pemilu menjadi viral, dapat diindikasikan adanya gelombang ketidakpuasan atau protes publik yang besar. Mengelaborasi lebih jauh, alat analisis seperti pers.droneemprit.id ini sangat berharga karena mereka memberikan wawasan *real-time* ke dalam diskursus publik. Dengan menganalisis frekuensi, konteks, dan penyebaran kata kunci dan tagar, peneliti dan aktivis dapat mengukur intensitas dan jangkauan gerakan sosial. Selain itu, juga dapat diidentifikasi aktor-aktor kunci dalam jaringan sosial (seperti tokoh politik, influencer atau kelompok-kelompok advokasi), memantau perubahan sentimen seiring waktu, dan merespons dengan strategi yang lebih tepat sasaran untuk komunikasi dan mobilisasi lebih lanjut.

Dengan demikian, peran Twitter dan media sosial lainnya dalam gerakan menolak penundaan pemilu di Indonesia menggarisbawahi bagaimana teknologi digital telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari politik kontemporer dan aktivisme sosial, memberikan masyarakat alat yang kuat untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan pengambilan keputusan politik. Drone Emprit juga membuat grafik tren isu berdasarkan percakapan di media online dan Twitter berdasarkan mentions.

Gambar 1. Grafik Tren Isu di Media Online dan Twitter



Sumber: pers.droneemprit.id

Dapat dilihat bahwa percakapan tertinggi di media sosial terjadi pada 3 Maret 2023 dengan jumlah 19.274 mentions didorong putusan PN Jakpus terkait penundaan pemilu 2024. Selanjutnya, ekspos media online juga mengalami peningkatan pada 3 Maret 2023 sejumlah 3.827 mentions yang didorong oleh berbagai penolakan penundaan pemilu 2024. Penulis berkesempatan mewawancarai Ismail Fahmi sebagai Founder dari Drone Emprit untuk

mengonfirmasi peran penting media sosial dan konektivitas yang terbangun di media sosial.

Ismail Fahmi dalam wawancara penelitian ini menyampaikan bahwa:

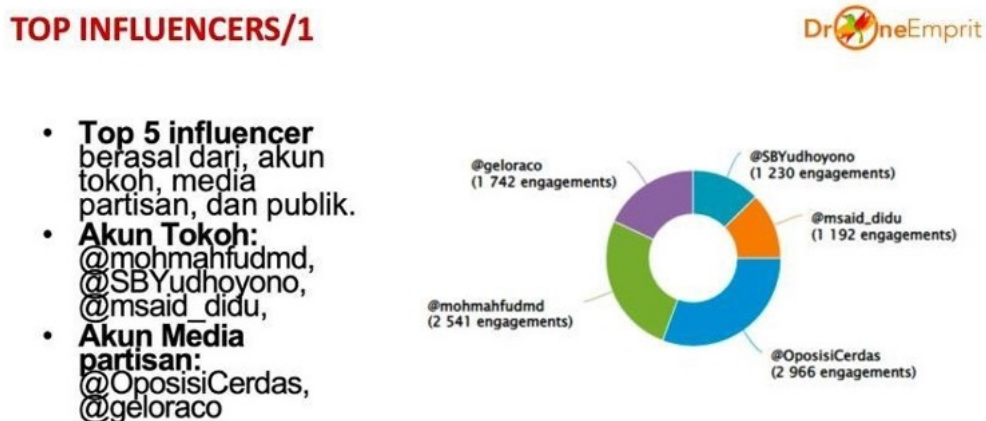
“Media sosial perannya sangat besar ya, dalam membangun opini. Saya perhatikan, pemerintah saat itu sangat mendengarkan sentimen di media sosial. Pak Jokowi tuh sangat mendengarkan ya opini publik di media sosial. Lembaga negara pun juga sama, banyak mendengarkan di media sosial. Jadi ketika ada niatan bikin kebijakan tertentu, publik masih bisa menganulir dan mengubah lewat opini di media sosial. Nah ini menariknya ya. Dan Pemerintah punya tools untuk mendengar, media monitoring analytic itu ada hampir di semua Kementerian-Lembaga bahkan sampai Presiden juga. Jadi voice di media sosial itu sangat penting akan sampai kesana.”

Peran media sosial di era digital saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ismail Fahmi bahwa para pemangku kebijakan memiliki tools untuk menganalisis berbagai respon dari setiap individu di media sosial. Dalam kerangka *Connective Action*, yang membedakannya dari *Collective Action* adalah kurangnya struktur organisasi hierarkis dan peran sentral dari teknologi komunikasi digital dalam menyatukan individu-individu. Dalam kasus penolakan terhadap penundaan pemilu di Indonesia, *Connective Action* terwujud melalui peran aktif dari warganet, yang menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengungkapkan pandangan mereka, berpartisipasi dalam dialog, dan mengorganisasi aksi. Ketika sebuah putusan pengadilan seperti Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst mendapatkan sorotan dan memicu diskursus publik, terutama di Twitter, media sosial menjadi arena utama berbagai narasi dan pandangan bersaing untuk mendominasi diskursus publik. Isu tentang dugaan penundaan pemilu sebagai upaya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah contoh dari narasi yang mengundang partisipasi publik yang intens dan reaksi dari berbagai kelompok masyarakat.

Analisis Drone Emprit yang mengidentifikasi percakapan dominan bernada kontra - seperti dugaan bahwa Presiden Jokowi berada di balik ide penundaan pemilu, pernyataan yang menekankan bahwa pemilu harus berjalan sesuai rencana, serta argumen yang mengatakan bahwa penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi - menunjukkan bagaimana media sosial mencerminkan dan sering kali memperkuat ketidakpuasan publik. Ajakan untuk melawan penundaan pemilu juga menunjukkan kekuatan mobilisasi dari media sosial, yang mana tagar dan kata kunci bertindak sebagai pemicu untuk aksi kolektif. Partisipasi para tokoh dan elit politik, seperti yang dicatat oleh sumber Drone Emprit, lebih lanjut menambah dimensi pada gerakan ini. Tokoh-tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mahfud MD, Hidayat Nur Wahid, Said Didu, Adhie Massardi, dan lainnya memiliki

pengikut yang signifikan dan dapat mempengaruhi opini publik melalui platform mereka. Apakah mereka mendukung atau menentang gerakan tersebut, keterlibatan mereka menambah legitimasi dan urgensi pada isu ini dan seringkali menghasilkan respon publik yang lebih besar.

Gambar 2. Top Infkuenchers



Sumber: pers.droneemprit.id

Dalam konteks *Connective Action*, teori ini memperjelas adanya kondisi dimana para aktor aksi tidak memiliki keterhubungan antara satu dengan lainnya, tetapi solidaritas terbentuk akibat keresahan dari rencana penundaan pemilu 2024. Tokoh-tokoh publik dapat dianggap sebagai "node" atau titik kunci dalam jaringan sosial yang menyebarkan informasi, memobilisasi pendukung, dan membentuk opini publik. Meskipun mereka mungkin bukan bagian dari struktur organisasi formal, kekuatan dan jangkauan mereka dalam media sosial membuat mereka menjadi pemain penting dalam gerakan sosial. Mereka mendorong individu-individu yang mungkin tidak terlibat langsung dengan politik untuk mengambil tindakan, baik itu melalui berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam debat online.

Berdasarkan hasil pemetaan di atas, penulis berkesempatan mengonfirmasi langsung kepada Ismail Fahmi sebagai Founder dari Drone Emprit. Konektivitas antara tokoh politik dan publik menjadi satu aspek penting, Ismail Fahmi mengatakan:

"Diantara tokoh-tokoh politik ini kan mereka bicara dari segi gagasan dan gagasannya saling mendukung. Seperti yang saya bilang tadi, medsos ini kan memberi dukungan kepada mereka. Suara itu jadi semakin kuat gitu, nih liat saya punya suara ini lalu didukung oleh banyak masyarakat tuh gitu. Jadi makin kuat dan saling mengamplifikasi. Kalau seandainya masyarakat gak bicara dan mendukung kemudian Pak SBY, Pak Mahfud MD menolak, ya ndak bisa jadi besar percakapannya jika tidak ada yang mengamplifikasi. Adanya tokoh-tokoh publik bersuara itu, mereka speak up, kemudian itu diamplifikasi dan didukung oleh publik maka akan menjadi isu publik. Kalau publik tidak melihat itu penting, bisa jadi itu isunya hanya isu elit, itu sering terjadi dengan isu-isu hukum."

Dalam penelitian ini, pengguna media sosial yang memperoleh perhatian atau memiliki pengaruh signifikan di platform tersebut dianggap sebagai *opinion leaders*. Teori *Connective Action* memberikan wawasan yang dalam tentang peran sentral individu-individu ini dalam menghubungkan orang lain dan memotivasi mereka untuk ikut serta dalam gerakan sosial salah satunya adalah kelompok media yang turut menyuarakan melalui platform sosial media. Dalam hal ini dilansir pada pers.droneemprit.id adanya cuitan yang dilayangkan oleh media Narasi yaitu, @NarasiNewsroom: Agak mencurigakan ya. Kalau kata CSIS, isu penundaan pemilu ini digerakkan oleh kelompok yang relatif terorganisir dan sistematis. Menurutmu gimana?.

Hal ini lah yang membuat *Connective Action* menekankan pentingnya kecepatan dan efisiensi dalam penyebaran informasi melalui media sosial. Hasil penelitian yang menunjukkan Twitter sebagai platform yang memungkinkan interaksi yang efisien dan komunikasi *real-time* mencerminkan konsep bahwa media sosial memfasilitasi penyebaran informasi yang cepat dan efisien, yang merupakan elemen kunci dalam pengorganisasian gerakan sosial. Dalam pers.droneemprit.id dicantumkan respon publik yang terbagi menjadi pro dan kontra terkait gagasan penundaan pemilu dengan rincian sebagai berikut Pro (6%): Sebagian publik memberikan dukungan terhadap gagasan penundaan pemilu. Mereka juga mengamplifikasi narasi terkait upaya untuk menghormati hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Selain itu, terdapat penjelasan dari Partai Prima yang mencoba menjelaskan tuntutan haknya untuk menjadi peserta pemilu. Kontra (91%): Sejumlah besar publik, sebagian besar, menunjukkan sikap kontra terhadap gagasan penundaan pemilu. Mereka menduga bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga menjadi dalang di balik ide tersebut. Muncul kecurigaan adanya kekuatan besar yang memengaruhi putusan penundaan pemilu.

Mahasiswa juga menjadi salah satu bagian dari pengguna Twitter yang merespons kontra terhadap putusan PN Jakpus terkait penundaan pemilu melalui akun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dua akun yang menyuarakan dan merilis sikap terhadap penolakan putusan PN Jakpus tersebut adalah akun BEM Universitas Indonesia (BEM UI) dan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Pada akun Twitter BEM UI membuat sebuah tweet dengan judul "Putusan PN Jakpus Menunda Pemilu: Presiden Harus Angkat Suara". Sedangkan BEM SI membuat rilis dengan judul "Putusan PN Jakpus Kok Sesat?" yang berisikan empat tuntutan

yakni; (1) Menolak segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak manapun yang ingin melakukan penundaan pemilu secara sistemik, (2) Meminta KPU tetap melanjutkan tahapan pemilu, (3) Meminta sikap yang jelas dari pemerintah berkaitan dengan Pemilu 2024, (4) Meminta Komisi Yudisial Untuk memeriksa seluruh hakim yang terlibat dalam putusan tersebut. Rilis dari BEM UI dan BEM SI tersebut berturut-turut dipublikasikan pada 5 dan 6 Maret 2023. Melki Sedek Huang sebagai Ketua BEM UI 2023 dalam wawancara penelitian ini mengatakan bahwa:

“BEM UI waktu itu mengeluarkan rilis karena melihat ada yang janggal dalam putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan agar pemilu 2024 ditunda. Nah, setelah itu kita liat juga di medsos mulai rame nih penolakan terhadap putusan PN Jakpus tadi. Apalagi udah banyak pakar hukum di medsos pribadi yang bilang kalo putusan ini salah sasaran dan diluar kewenangan. Waktu itu emang setelah putusan ini keluar dan rame di medsos, terutama twitter ya waktu itu kita langsung rapat buat bikin rilis di Twitter dan IG BEM UI. Kalo ditanya medsos ini ningkatin konektivitas atau engga sih ya pasti iya karna kita jadi tau kalo putusan ini cacat hukum dan rame-rame ditentang oleh para ahli sama politisi.”

Muhammad Yuza Augusti sebagai Koordinator BEM SI juga mengatakan bahwa:

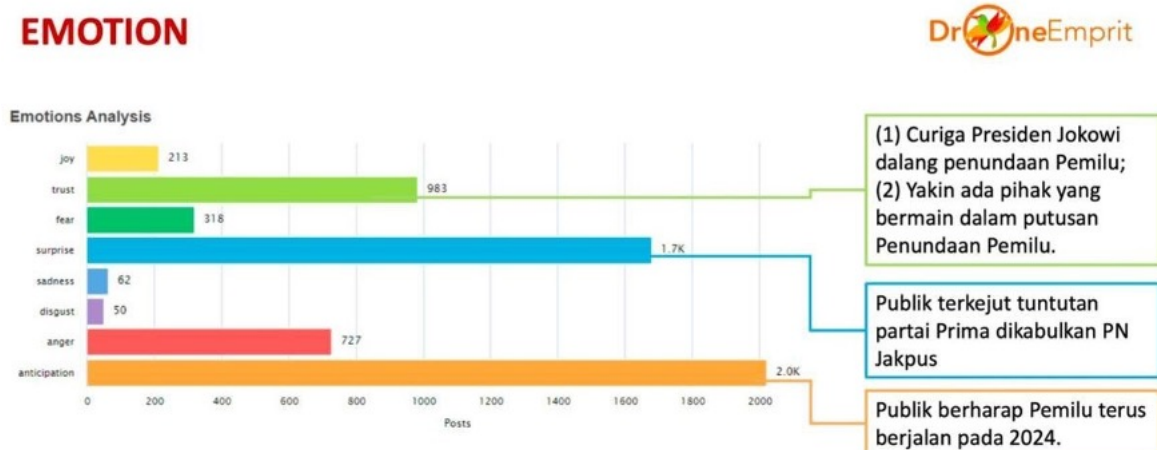
“Kalo ditarik dari tahun 2022 kan BEM SI emang udah konsisten menolak wacana penundaan pemilu. Terus di tahun 2023 muncul lagi isunya setelah putusan PN Jakpus. Setelah itu kami tetap konsisten untuk mengawal dan menolak putusan tersebut. Saya rasa sih sebenarnya isu ini udah agak turun atensinya karena terakhir di kawal awal tahun 2022, lalu baru naik lagi di awal tahun 2023. BEM SI secara kelembagaan bersepakat buat ngeluarin rilis dalam bentuk infografis. Kami juga waktu itu mengutip beberapa pendapat pakar hukum seperti Mba Bivitri yang vokal tentang penolakan ini. Kami terkoneksi dengan para ahli tentunya dari medsos ya, kita liat aja di medsos waktu itu siapa ahli yang ngomong buat nolak penundaan pemilu. Kalau terkait signifikansi dari medsos itu sendiri pastinya saya ngerasa sangat signifikan sih utamanya buat nyambungin kita sama banyak pihak dan memperluas jangkauan dari sikap yang BEM SI buat.”

Dapat dilihat bahwa mahasiswa melalui BEM juga memanfaatkan media sosial untuk menjaring konektivitas diantara mereka dan pihak-pihak yang berada dalam stance yang sama. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang kontra terhadap putusan PN Jakpus sehingga gelombang penolakan rencana penundaan pemilu semakin besar. Melalui pernyataan BEM UI dan BEM SI, gerakan di media sosial dibangun pada awalnya karena terpantik oleh parah tokoh-tokoh atau ahli yang mengungkapkan ketidaksetujuannya di media sosial. Elaborasi lebih jauh, dalam *Connective Action*, pesan-pesan yang dikirim oleh tokoh-tokoh ini tidak harus mengikuti garis partai atau ideologi yang kaku, tapi seringkali lebih bersifat pribadi dan ekspresif. Ini memungkinkan berbagai interpretasi dan partisipasi, menciptakan gerakan yang

lebih inklusif dan dinamis yang mampu menyesuaikan dan merespon secara *real-time* terhadap perubahan kondisi dan sentimen publik. Dengan demikian, *Connective Action* dalam konteks penolakan penundaan pemilu di Indonesia menyoroti pentingnya individu-individu berpengaruh dalam politik dan media sosial, yang bersama-sama membentuk gelombang kekuatan kolektif yang dapat mempengaruhi agenda politik dan sosial.

Publik menekankan keyakinan bahwa pemilu akan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan menilai bahwa penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi. Terdapat pula ajakan kepada publik untuk melawan adanya gagasan penundaan pemilu. Drone Emprit juga menganalisis emosi dari para pengguna Twitter yang dibagi menjadi joy (gembira), trust (keyakinan), fear (ketakutan), surprise (terkejut), sadness (kesedihan), anger (marah), anticipation (antisipasi)

Gambar 3. Emosi Pengguna Media Sosial



Sumber: pers.droneemprit.id

Hasil ini mencerminkan beragam pandangan dan reaksi dalam masyarakat terkait isu penundaan pemilu yang masih dalam perdebatan dan kontroversi sebagai dampak dari gerakan menunda pemilu di platform sosial media. Pada analisis emosi ini, terlihat bagaimana perasaan publik merespons gagasan penundaan pemilu. Terdapat beberapa aspek emosional yang muncul:

1. Antisipasi: Publik dengan penuh harapan menginginkan agar pemilu tetap berlangsung sesuai jadwal pada tahun 2024. Mereka mengharapkan proses demokrasi berjalan dengan lancar.

2. Kejutan: Publik merasa terkejut ketika mengetahui bahwa tuntutan dari Partai Prima dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Keputusan ini menjadi sumber kejutan dan perhatian masyarakat.

Dalam konteks kepercayaan, ada dua aspek yang mencuat:

1. Publik curiga bahwa Presiden Jokowi memiliki peran penting dalam ide penundaan pemilu. Mereka merasa ada indikasi bahwa keputusan ini mungkin ada kaitannya dengan Presiden.
2. Publik yakin bahwa ada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam keputusan penundaan pemilu. Mereka merasa bahwa ada elemen lain yang memengaruhi keputusan ini. (Drone Emprit, 2023)

Analisis emosi ini mencerminkan beragam perasaan dan reaksi publik terkait dengan isu penundaan pemilu. Terdapat antisipasi kuat terhadap kelangsungan proses demokrasi, bersama dengan kejutan dan perasaan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam sebuah analisis tren, perbincangan terkait isu penundaan pemilu di Indonesia mencapai tingkat sorotan yang sangat tinggi di media sosial, terutama setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan dari Partai Prima yang menginginkan penundaan Pemilu 2024. Dalam kerangka teori *Connective Action* analisis ini memerhatikan serangkaian temuan penting yang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana perbincangan ini berkembang dan bagaimana peran media sosial dalam mengorganisasi dan memobilisasi reaksi publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menggambarkan betapa media sosial memainkan peran sentral dalam memfasilitasi perbincangan dan mobilisasi masyarakat terkait isu penundaan Pemilu 2024 di Indonesia. Dalam kerangka teori *Connective Action* oleh Bennett & Segerberg, media sosial memungkinkan pertukaran informasi, pengorganisasian, dan mobilisasi dukungan untuk berbagai gerakan sosial, menjadikan media sosial sebagai alat penting dalam proses komunikasi politik dan partisipasi publik di era digital.

Beberapa temuan utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Isu penundaan pemilu menjadi perhatian utama di media sosial setelah keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan dari Partai Prima yang mendukung penundaan Pemilu tahun 2024. Isu ini menjadi sangat viral dan mendapatkan perbincangan yang tinggi di platform media sosial utamanya Twitter.
2. Perbincangan di media sosial dominan diisi dengan narasi yang mengkritisi rencana penundaan pemilu. Para politisi, pakar hukum, pengamat, serta masyarakat umum secara luas menyuarakan ketidaksetujuan terhadap keputusan PN Jakarta Pusat. Peran tokoh-tokoh besar, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mahfud MD, Hidayat Nur Wahid, Said Didu, Adhie Massardi dan lainnya, sangat signifikan dalam mengoordinasikan penolakan.
3. Jejaring komunikasi dan konektivitas menjadi metode utama dalam mengorganisasi gerakan di media sosial. Jejaring komunikasi bertindak sebagai pengoordinasi gerakan, memungkinkan individu-individu yang mungkin tidak saling mengenal atau bertemu secara langsung untuk terlibat dalam aksi tersebut. Konektivitas antara tokoh politik dan publik melalui media sosial telah menghasilkan sebuah gerakan yang masif hingga terdengar para pemangku kebijakan.

Emosi dan kepercayaan publik terhadap isu penundaan pemilu tercermin dalam analisis emosi. Publik merasa antusias untuk melanjutkan proses demokrasi dan terkejut ketika tuntutan Partai Prima dikabulkan. Di sisi lain, ada kecurigaan terhadap peran Presiden Jokowi dan keyakinan bahwa ada pihak lain yang memengaruhi keputusan penundaan pemilu. Kesimpulannya, media sosial telah menjadi alat yang sangat penting dalam mengoordinasikan reaksi publik terhadap isu-isu politik dan sosial. Dalam hal ini, teori *Connective Action* memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana media sosial memungkinkan pertukaran informasi, mobilisasi publik, dan koordinasi aksi kolektif. Analisis ini juga memperlihatkan bagaimana perasaan dan emosi publik berperan dalam merespons isu-isu penting dalam masyarakat. Dalam konteks gerakan menolak rencana penundaan pemilu, media sosial telah menjadi platform utama opini dan penolakan dapat dinyatakan dan dibagikan sehingga memberikan dampak signifikan pada proses politik dan partisipasi

publik. Dapat disimpulkan bahwa media sosial telah berhasil mensukseskan gerakan menolak penundaan pemilu di Indonesia karena konektivitas yang dibangun oleh para penggunanya.

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Perlu adanya penelitian yang lain yang membahas analisis dengan menggunakan medsos lain di luar twitter. Penelitian ini adalah awal dari proses mendalam tentang pembahasan gerakan menolak rencana penundaan pemilu di Indonesia. Artikel ini mengatasi kekosongan kajian di luar bidang hukum (legal) dan memenuhi aspek komunikasi politik. Artinya, masih banyak kekosongan di bidang lain yang dapat diisi oleh penelitian lebih lanjut.
2. Pengalaman gerakan menolak wacana pembatalan pemilu 2024 penting untuk menjaga keterbukaan partisipasi warga menjaga demokrasi sejak 1998. Keterbukaan, ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang alasan di balik keputusan politik, proses pengambilan keputusan, serta dampak yang diharapkan. Dalam konteks media sosial yang rentan terhadap spekulasi dan teori konspirasi, keterbukaan ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan keraguan yang sering kali muncul di antara publik. Selain itu, pemerintah dan lembaga kehakiman harus berkomunikasi secara efektif dengan publik, menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga integritas proses politik, dan memberikan ruang bagi pertanyaan dan umpan balik dari masyarakat. Dengan cara ini, kepercayaan publik dapat ditingkatkan, dan publik akan lebih mungkin memahami dan mendukung keputusan politik yang diambil.
3. Partisipasi publik yang konstruktif dalam proses politik adalah kunci untuk membangun demokrasi yang kuat dan inklusif. Pemerintah harus secara aktif mendorong partisipasi publik dan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Blais A, Morin-Chassé A, & Singh SP. (2017). Election outcomes, legislative representation, and satisfaction with democracy. *Party Politics* 23 (2):85-95. <https://doi.org/10.1177/1354068815583200>

- Diprose R, McRae D, & Hadiz VR (2019) Two decades of reformasi in Indonesia: its illiberal turn. *Journal of Contemporary Asia* 49 (5):691-712.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>
- Carlo Bertot, J., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. *Transforming government: people, process and policy*, 6(1), 78-91.
- Cho, S. E., Jung, K., & Park, H. W. (2013). Social media use during Japan's 2011 earthquake: how Twitter transforms the locus of crisis communication. *Media International Australia*, 149(1), 28-40.
- CNN Indonesia. (2022). Airlangga dorong wacana penundaan pemilu dibahas seluruh ketum partai. CNN Indonesia, 11 March. [Accessed 17 Oktober 2023].
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310184726-32-769601/airlangga-dorong-wacana-penundaan-pemilu-dibahasseluruh-ketum-partai>.
- CNN Indonesia. (2022). Saling lempar "Bola panas" penundaan pemilu 2024. CNN Indonesia, 8 March 9. [Accessed 17 Oktober 2023].
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308084849-32-768106/saling-lempar-bola-panas-penundaan-pemilu-2024>.
- Damarjati, Danu. (2023). Aliansi Mahasiswa Akan Gelar Kongres Rakyat dan Demo 21 April. Detik.com, 14 April 2022. [Accessed 17 Oktober 2023]
<https://news.detik.com/berita/d-6032983/aliansi-mahasiswa-akan-gelar-kongres-rakyat-dan-demo-21-april>
- Denzin, N. K. (2017). Critical qualitative inquiry. *Qualitative inquiry*, 23(1), 8-16.
- Elsahed, H. (2020). Social media mobilization and political activism in Egypt. *Global Media Journal*, 18(34), 1-8.
- Fahmi, Ismail. (2023). Penundaan Pemilu : Analisis Pemberitaan di Media Online dan Media Sosial. <https://pers.droneemprit.id/penundaan-pemilu/> [Accessed 10 Oktober 2023].
- Febriyan. (2022.) 3 partai pengusul penundaan pemilu 2024 disebut mendapat sentimen negatif. Tempo.co, 4 March. [Accessed 24 Oktober 2023].
<https://nasional.tempo.co/read/1566972/3-partai-pengusulpenundaan-pemilu-2024-disebut-mendapat-sentimen-negatif>.
- Galuh, I. G. A. A. K. (2016). Media sosial sebagai strategi gerakan Bali tolak reklamasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 73-92.
- Griffin, E.M. (2006). *A First Look At Communication Theory*. Sixth Edition. New York: McGraw Hill.
- Jürgens, P., & Jungherr, A. (2015). The use of Twitter during the 2009 German national election. *Journal German politics*, 24(4), 469-490.
- Kapriani, D. R., & Lubis, D. P. (2014). Effectiveness of social media for social movements of environmental conservation. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3).
- Kompas.com. (2022). Jokowi Lantik Zulkifli Hasan Jadi Menteri Perdagangan, PAN Akhirnya

- Dapat Kursi. Kompas.com 15 Juni 2022. [Accessed 1 November 2023]. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/13383901/jokowi-lantik-zulkifli-hasan-jadi-menteri-perdagangan-pan-akhirnya-dapat?page=all>
- Kumparan.com. (2023). Luhut ke UI, Disambut Bendera Kuning dari Mahasiswa. Kumparan.com, 12 April 2022. [Accessed 1 November 2023]. <https://kumparan.com/kumparannews/luhut-ke-ui-disambut-bendera-kuning-dari-mahasiswa-1xrpDyxOUcA>
- Laney, D. (2001). 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety. Gartner Research.
- Leavy, P. (Ed.). (2017). Handbook of arts-based research. Guilford Publications.
- Lee, S. (2018). The role of social media in protest participation: The case of candlelight vigils in South Korea. *International Journal of Communication*, 12, 18.
- Najicha FU & Hermawan S. (2019). Law in the globalization and its influence on economic development and environmental preservation based on Pancasila and the Indonesian constitution of 1945. 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) 317-321. <https://doi.org/10.2991/icgslow-19.2019.78>
- Nasihudin, Ade. (2022). Mahasiswa Seluruh Indonesia Turun Ke Jalan, Demo 11 April Tentang Apa. Liputan6.com, 11 April 2022. [Accessed 11 November 2023].
- Nurita, Dewi. (2023). Gerakan Masyarakat Menolak Penundaan Pemilu 2024 Terus Meluas. Tempo.co 16 March 2022 [Accessed 31 Oktober 2023]. <https://nasional.tempo.co/read/1571514/gerakan-masyarakat-menolak-penundaan-pemilu-2024-terus-meluas>.
- Seebaluck, A. (2014). How social media affects the dynamics of protest (Doctoral dissertation, Monterey, California: Naval Postgraduate School).
- Shih, C. C., Lin, T. M., & Luarn, P. (2014). Fan-centric social media: The Xiaomi phenomenon in China. *Business Horizons*, 57(3), 349-358.
- Sitowin, P., & Alfirdaus, L. K. (2019). Media Sosial dan Gerakan Sosial Studi Kasus: Penggunaan Instagram Dalam Penolakan Pendirian Pabrik Semen di Kabupaten Rembang. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(03), 271-280.
- Taprial, V., & Kanwar, P. (2012). Understanding social media. Bookboon.
- Tusa, F. (2013). How social media can shape a protest movement: The cases of Egypt in 2011 and Iran in 2009. *Arab Media and Society*, 17(2013), 1-14.
- Valenzuela, S. (2013). Unpacking the use of social media for protest behavior: The roles of information, opinion expression, and activism. *American behavioral scientist*, 57(7), 920-942.